

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Teks

- BPKP, 2006, *Sistem Administrasi Keuangan Negara*, Bogor: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP, Edisi Kelima.
- Curzon, L.B., 1979, *Jurisprudence*, M&E Handbook.
- Dworkin, Ronald, 1973, *Legal Research*, Daedlu: Spring.
- Edquist, Charles, *et.al.*, 2000, *Public Technology Procurement and Innovation*, Boston: KluwerAcademic Publishers.
- Elias E., Savelos & Galvin, Richard F., 2001, *Reasoning and the Law: the Elements*. Belmont: Wadsworth.
- Huijbers, Theo, 1995, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius.
- Kagramanto, L. Budi, 2008, *Larangan Persekongkolan Tender (Perspektif Hukum Persaingan Usaha)*, Surabaya: Srikandi.
- Khemani, R. Shyam, *et.al.*, 1999, *A Framework for the Design and Implementation of Competition Law and Paolicy, The World Bank and Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)*, ,Washington DC. and Paris.
- Kusumohamidjojo, Budiono, 1999, *Ketertiban Yang Adil Problematik Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Lubis, Andi Fahmi, *et.al.*, 2009, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, Jakarta: KPPU.
- Makarim, Edmon, 2010, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Nurachmad, Much., 2011, *Buku Pintar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Jakarta : Transmedia Perkasa.
- Rahardjo, Satjipto, (1995), *Ilmu Hukum*, Bandung : Alumni.

- Rawls, John, 1973, *A Theory of Justice*, London, Oxford, New York: Oxford University Press.
- Ridwan, H.R , 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers
- Silalahi, M. Udin, 2007, *Perusahaan Saling Memenangkan & Bersekongkol. Bagaimana Cara Mematikan*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Sirait, Ningrum Natasya, 2004, *Hukum Persaingan di Indonesia, UU No.5/1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Soeprpto, Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-undangan Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, , Yogyakarta: Kanisius.
- Suswinarno, 2012, *Aman dari Risiko dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Jakarta: Visimedia
- Sutedi, Adrian, 2010, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Usman, Rachmadi, 2004, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- WA, Sugiman, 2013, *Antisipasi Risiko Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa di Perusahaan BUMN*, Jakarta : BP.Cipta Karya.
- Yani, Ahmad dan Wijaya, Gunawan, 1999, *Anti Monopoli*, , Jakarta: Raya Grafindo Persada.

B. Artikel dan Jurnal

- Adinegoro, Himawan, "E-Proc Cegah Korupsi", *Harian Neraca*, 11 Juni 2011.
- Anggraini, A.M. Tri, 2003, "Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat ; *Perse Illegal* atau *Rule of Reason*", Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- _____, "Sinergi BUMN Dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Dalam Perspektif Persaingan Usaha, *Mimbar Hukum*", Volume 25, Oktober 2013.

- Asshiddiqie, Jimly, 2002, *Judicial Review: Kajian atas Putusan Permohonan Hak Uji Materil terhadap PP Nomor 19 Tahun 2000, tentang TGPTPK* Jurnal Dictum, edisi 1.
- Azhari, Hanifa, 2014, Tesis, *Tinjauan Yuridis Terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Terkait Pengadaan Barang dan Jasa Bagi Industri Farmasi di Indonesia*, Yogyakarta, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Hadjon, Philipus M., “Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi Atas Tindak Pemerintahan”, Makalah disampaikan pada Lokakarya Hukum Administrasi dan Korupsi, Departemen HTN FH Unair Surabaya, 28-30 Oktober 2008.
- Krisanto, Yakub Adi, 2005, "Analisis Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dan Karakteristik Putusan KPPU tentang Persekongkolan Tender“, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 24 Nomor II.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah, 2010, *Pengantar Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia*, Modul Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar/Pertama.
- Nightisabha, Ika Akyuna, etl.al, 2009, *Persepsi Pengguna Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta Terhadap Implementasi Sistem E-Procurement*, Jurnal Siasat Bisnis, Volume 13 No.2.
- Nusianto, Endro, 2011, Tesis, *Peran Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Dalam Mencegah Praktek Korupsi di Indonesia*, Yogyakarta : Program Magister Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Nur Bahagia, Senator, "Sistem Pengadaan Publik dan Cakupannya“, Jurnal Pengadaan, Volume 1 Nomor 1, 2011.
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Perindustrian, “Pengertian, Dasar Pendanaan, Pelaku, Konsepsi, Cakupan, dan Siklus Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah”, Jakarta, Bahan Ajar Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Pertama (Brevet C).

_____, “Prinsip-Prinsip Dasar, Kebijakan Umum, Etika, Tata Cara Kepemerintahan Yang Baik/*Good Governance*, dan Aspek Hukum, Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”, Jakarta, Bahan Ajar Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Pertama (Brevet C).

Sidaharta, 2005, "Narasi Inisiatif Harmonisasi Sistem Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia, Menuju Harmonisasi Sistem Hukum Sebagai Pilar Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia“, Jakarta : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia kerjasama dengan Mitra Pesisir/*Coastal Resources Management Project II*.

Sjahdeni, Sutan Remy, 2000, "Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat“, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 10.

C. Peraturan Perundang-undangan

UNCITRAL Model On Law Public Procurement, Viena, United Nations, 2014

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833).

Undang-Undang Nomor.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955).
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956).
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761).
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348).

Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212).

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Perjanjian Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Publik.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah .

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334).

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655).

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62).

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.01/2012 tentang Mekanisme Registrasi, Verifikasi, dan Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa Pada Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 854).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.01/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1332).

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender.

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang *E-Purchasing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 758).

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang *E-Tendering* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157).

Badan Pemeriksa Keuangan, 1983, *Petunjuk Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal BPK.

Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/SE/M/2011 tanggal 3 Oktober 2011 perihal Pelaksanaan Pengadaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi Serta Kualifikasi Penyedia Jasa Konstruksi.

D. Internet

Erman Rajaguguk, "Judicial Review Peraturan Menteri: Penerapan Stufentheorie Hans Kelsen, www.yumpu.com, diakses pada tanggal 3 Mei 2015.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah, *E-Purchasing*, <http://eproc.lkpp.go.id>, diakses pada tanggal, diakses pada tanggal 4 Mei 2015.

Sherlya Nindya Sari, “Evaluasi Electronic Procurement Dalam Sistem Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kota Surabaya”, www.scribd.com, diakses pada tanggal 7 Mei 2015.

LPSE, Sejarah Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik, <http://lpse.blogdetik.com>, diakses pada tanggal 5 Juni 2015.